

Lampiran 1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-24/PJ.52/1998
Tanggal : 16 Nopember 1998

DIREKTORAT KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan PPN
Ditanggung oleh Pemerintah

Yth. Direktur Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42
JAKARTA

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.04/1998 tanggal 5 Nopember 1998, dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh Pemerintah untuk Impor Barang Kena Pajak dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan nomor dokumen impor	Kuantum	Nilai Impor (CIF+Bea Masuk) (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Penyelesaian dokumen impor dilakukan pada Bank
Cabang..... Kantor Bea dan Cukai

Terlampir disampaikan dokumen impor :L/C, Invoice, B/L atau Airway Bill.

.....
Pemohon,

.....

UNTUK DINAS
Diterima tanggal

Petugas,

Lampiran 2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-24/PJ.52/1998
Tanggal : 16 Nopember 1998
Lembar ke-1 : Untuk Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
Nomor : KET- /PJ. /

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

Sesuai dengan surat permohonan tanggal

Nomor, maka atas impor Barang Kena Pajak tersebut dibawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan nomor dokumen impor	Kuantum	Nilai Impor (CIF+Bea Masuk) (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.04/1998 tanggal 5 Nopember 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada bersama dengan Surat Setoran Pajak dan PIB.

Jakarta,
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Diisi oleh Bank Devisa/Kantor Ditjen Bea dan Cukai
Surat Keterangan in telah dipergunakan
tanggal
Pejabat ybs.

(.....)

(.....)

Lampiran 2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-24/PJ.52/1998
Tanggal : 16 Nopember 1998
Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERNAGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
Nomor : KET- /PJ. /

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

Sesuai dengan surat permohonan tanggal
Nomor, maka atas impor Barang Kena Pajak tersebut dibawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan nomor dokumen impor	Kuantum	Nilai Impor (CIF+Bea Masuk) (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.04/1998 tanggal 5 Nopember 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada bersama dengan Surat Setoran Pajak dan PIB.

Jakarta,
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

(.....)

Lampiran 2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-24/PJ.52/1998
Tanggal : 16 Nopember 1998
Lembar ke-3 : Untuk Pengusaha Kena Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
Nomor : KET- /PJ. /

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
N.P.W.P. :

Sesuai dengan surat permohonan tanggal
Nomor, maka atas impor Barang Kena Pajak tersebut dibawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan nomor dokumen impor	Kuantum	Nilai Impor (CIF+Bea Masuk) (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.04/1998 tanggal 5 Nopember 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada bersama dengan Surat Setoran Pajak dan PIB.

Jakarta,
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

(.....)

Lampiran 2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-24/PJ.52/1998
Tanggal : 16 Nopember 1998
Lembar ke-4 : Untuk Pengusaha Kena Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
Nomor : KET- /PJ. /

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :

Sesuai dengan surat permohonan tanggal
Nomor, maka atas impor Barang Kena Pajak tersebut dibawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan nomor dokumen impor	Kuantum	Nilai Impor (CIF+Bea Masuk) (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.04/1998 tanggal 5 Nopember 1998.

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada bersama dengan Surat Setoran Pajak dan PIB.

Jakarta,
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

(.....)

Lampiran 3
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-24/PJ.52/1998
Tanggal : 16 Nopember 1998

Contoh Cap PPN Ditanggung Pemerintah

PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH EKS KEP. MEN. KEU. NOMOR 478/KMK.04/1998	
SURAT KETERANGAN PPN DTP	
Nomor :
Tanggal :

Lampiran 4
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-24/PJ.52/1998
Tanggal : 16 Nopember 1998

(Nama dan alamat Kantor Bea dan Cukai/Bank)
.....
.....

Nomor :
Lampiran :

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....
Jalan
.....

PENGANTAR DOKUMEN IMPOR MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS
DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS
EKS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 478/KMK.04/1998
Bulan.....Tahun.....

No.	JENIS DOKUMEN	JUMLAH DOKUMEN	JUMLAH PPN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (Rp)
1.	Surat Setoran Pajak (SSP)		
2.	Bukti Pungutan Pajak Atas Impor (KP.PPh.2.3HP-96)		
3.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)		

..... 19
Pejabat Ybs.

(.....)

Lampiran 5
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-24/PJ.52/1998
 Tanggal : 16 Nopember 1998

Contoh Cap PPN Ditanggung Pemerintah

PPN DITANGGUNG OLEH
 PEMERINTAH
 EKS. KEP. MEN. KEU. NOMOR
 478/KMK.04/1998

Lampiran 6
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-24/PJ.52/1998
 Tanggal : 16 Nopember 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP

Kepada Yth.
 DIREKTUR PERENCANAAN
 DAN POTENSI PERPAJAKAN
 di - JAKARTA

DAFTAR IMPER MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS
 DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS
 YANG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
 Triwulan : 19.....

No.	NAMA DAN ALAMAT PKP/IMPORTIR	NPWP	PIB DAN SSP		No. & Tgl. Surat. KetKEP PPN DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH				Keterangan	
			NO. PIB	TGL. SSP		IMPOR		PENYERAHAN DALAM NEGERI			
						Rp.	Jumlah Faktur Pajak	Rp.	Jumlah Faktur Pajak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	KPP..... 1. 2. 3. Jumlah										
2.	KPP..... 1. 2. 3. Jumlah										
dst.											
JUMLAH TRIWULAN INI											
JUMLAH S.D TRIWULAN LALU											
JUMLA S.D. TRIWULAN INI											

.....
 KEPALA KANTOR WILAYAH

 NIP.